

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan hal utama yang terlintas jika kita membahas mengenai perekonomian global. Perdagangan internasional sendiri merupakan kegiatan transaksi berupa barang, jasa, maupun investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat antar negara. Seperti yang disampaikan Huala Adolf dalam bukunya, perdagangan internasional merupakan upaya yang dilakukan demi mendapatkan berbagai manfaat dan keuntungan bagi suatu negara yang melakukan kegiatan berupa aktivitas jual beli yang terjadi antar-negara(Adolf, 2006). Dalam perdagangan internasional di masa kini, sistem perdagangan bebas menjadi hal yang tak dapat terpisahkan hampir dalam setiap kegiatan perdagangan internasional. Upaya meminimalisir hambatan yang ada dalam perdagangan internasional dianggap merupakan salah satu langkah terbaik untuk memaksimalkan potensi ekonomi bagi kedua pihak atau lebih, yang terikat suatu kerjasama perdagangan. Dengan pesatnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, perdagangan bebas kini sudah menjadi tren dalam pembuatan berbagai kesepakatan, baik kesepakatan bilateral maupun multilateral. Dan pelaku dari perdagangan bebas tidak hanya segelintir negara atau regional maju saja, namun hampir di setiap belahan dunia.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang dapat dikatakan memiliki peran aktif dalam kegiatan perdagangan internasional. Kehadirannya sebagai negara adidaya pasca perang dingin berakhir tentu membuat Amerika Serikat punya posisi yang kuat dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal ini juga terlihat dari banyaknya negara yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat. Selain aktif dalam kegiatan perdagangan internasional, Amerika Serikat juga punya andil besar terhadap perkembangan sistem perdagangan internasional hingga menjadi seperti saat ini. Amerika Serikat ialah negara yang memprakarsai terbentuknya sistem perdagangan multilateral yang terbuka. Pasca perang dunia II berakhir, tepatnya di tahun 1947, lahirnya gagasan berbentuk kesepakatan mengenai tariff dalam perdagangan antar negara, yang

kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya World Trade Organization (WTO). Dengan keberadaan WTO, perdagangan internasional antar negara diatur melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip tanpa diskriminasi antar semua pelaku kegiatan perdagangan. Sistem tersebut terbukti sukses besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan berhasilnya sistem WTO dan tumbuhnya ekonomi global secara pesat dibawahnya, telah membuat banyak ide dan gagasan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan upaya untuk meminimalisir hambatan hingga sekecil mungkin. Dengan kepemimpinan AS, banyak terciptanya negosiasi multilateral untuk upaya penurunan tariff dagang, serta penghapusan berbagai jenis hambatan perdagangan lainnya, mulai dari batasan jumlah impor hingga upaya memfasilitasi ekspansi perdagangan.

Amerika Serikat dalam beberapa dekade belakangan dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem perekonomian liberal yang mendukung berjalannya praktik perdagangan bebas. Banyak bentuk perjanjian perdagangan bebas yang merupakan hasil inisiasi Amerika Serikat. NAFTA (*North America Free Trade Area*), TPP (*Trans Pacific Partnership*), dan TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) merupakan sebagian diantaranya.

Namun hal yang berbanding terbalik justru terjadi pasca kemenangan Donald Trump pada pemilihan umum Amerika Serikat di tahun 2016 silam. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat telah banyak membawa perubahan terutama dalam hal kebijakan perdagangan internasional Amerika Serikat. Presiden terpilih AS, Donald Trump dengan tegas dan secara terbuka menolak sistem perdagangan multilateral yang terbuka. Hal ini sebenarnya sudah banyak diprediksi akan terjadi sejak jauh-jauh hari seandainya Donald Trump mampu memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Sejak masa kampanye Trump memang sudah menunjukkan sikapnya yang cenderung konservatis. Ia lebih memilih pendekatan yang berbentuk kerja sama bilateral dalam kebijakan ekonomi internasionalnya. Hal ini menciptakan berbagai dinamika dan dampak yang besar, terutama terhadap hubungan perdagangan AS dengan berbagai mitra dagang utamanya. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi global baik dalam perdagangan internasional maupun produk domestik bruto (PDB) telah mengalami penurunan. Begitu pula dengan proyeksi pertumbuhannya. Dilansir dari laman

*kompas.com*, IMF dalam World Economic Outlook menyatakan adanya penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari yang sebelumnya 3,2 persen menjadi 3,0 persen akibat dari perang dagang itu sendiri. Perubahan arah kebijakan perdagangan internasional AS tersebut telah mampu mengguncang stabilitas ekonomi global, yang menunjukkan bagaimana sentralnya posisi Amerika Serikat dalam tatanan perekonomian global.

Kepemimpinan Donald Trump diawali dengan hadirnya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, yang dianggap oleh Trump mampu memberi kesejahteraan bagi pekerja di dalam negeri Amerika Serikat. Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap kondisi perekonomian saat itu dan kebijakan proteksionisme merupakan jalan keluar. Ia menilai perdagangan bebas yang telah berlangsung selama puluhan tahun merupakan sumber kehancuran industri manufaktur AS. Trump menilai pendekatan bilateral akan jauh lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat dalam strategi kebijakan ekonomi internasional. Berbagai macam kebijakan yang bersifat proteksionis lahir, salah satu kebijakan proteksionis kontroversial yang dicanangkan oleh Donald Trump ialah pembangunan tembok raksasa pembatas AS-Meksiko yang ditujukan untuk melindungi AS dari penyelundupan barang ilegal dan imigran gelap asal Meksiko. Selain itu ada pula kebijakan pengetatan arus imigrasi dari 7 negara asal Timur Tengah yang dianggap sebagai negara kantung utama jaringan teroris, yang kemudian mendapat kecaman dari banyak pihak karena terkesan diskriminatif dan dinilai hanya akan menyulut permasalahan lain timbul. Donald Trump memang sudah sejak lama dikenal dengan sifat anti-globalisasinya, dan kemenangannya pada pemilu AS ditakutkan akan berdampak besar terhadap sistem perdagangan internasional. Selain itu kebijakan ekonomi proteksionisme Donald Trump juga ditakutkan akan menciptakan suatu gelombang kebijakan proteksionis yang akan diambil oleh negara-negara lain sebagai kebijakan dalam merespons Amerika Serikat.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang menjadi titik utama dari berbagai kebijakan proteksionis Donald Trump. Ia beranggapan hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok tidak seimbang, dan AS merupakan pihak yang lebih banyak dirugikan dalam berbagai kegiatan perdagangannya dengan Tiongkok. Hal ini juga terlihat dari adanya neraca defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Hal tersebut lah

yang kemudian menjadi dasar dari diciptakannya kebijakan-kebijakan ekonomi perdagangan AS di masa kepemimpinan Donald Trump yang dikemudian hari mendapat respons negative dari pemerintah Tiongkok.

Pecahnya perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok pada Maret 2018 telah membuat perekonomian global sedikit terguncang. Saling balas membalas pemberian tarif hingga pelarangan penggunaan produk impor antara AS dan Tiongkok juga terus terjadi. Banyak negara yang sedikit merasakan efek dari berkejolaknya perang dagang tersebut. Dampak yang lebih besar diprediksi oleh pengamat ekonomi global. Banyak pengamat menganggap sengketa antara kedua negara yang menguasai perdagangan global tersebut akan menimbulkan efek domino hingga ke seluruh belahan dunia, hingga yang terburuk dunia akan dihadapkan kepada ancaman resesi global akibat dampak perang dagang AS dan Tiongkok.

Setelah dua tahun perang dagang antara AS dan Tiongkok, dampak terbesar yang ditimbulkan tentunya terjadi bagi kedua negara itu sendiri. Di Amerika Serikat, industri manufaktur tercatat mengalami penyusutan secara terus-menerus. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan apakah pada dasarnya kebijakan ekonomi proteksionisme yang dicanangkan Presiden Donald Trump mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri atau justru sebaliknya. Industri manufaktur sendiri sebenarnya merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki Amerika Serikat, adanya tarif yang diberikan kepada produk baja impor tentu akan mengganggu produksi dari produk manufaktur itu sendiri, secara industri manufaktur menggunakan baja sebagai salah satu bahan baku utamanya. Selain itu selama pemberlakuan tarif impor baja, banyak fakta baru menguak mengenai banyaknya pelaku industri manufaktur di AS yang menanggung biaya pengadaan tarif impor. Hal ini tentu menjadi sinyal yang menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme AS dapat menjadi bumerang terhadap industri dalam negeri itu sendiri. Lesunya industri dalam negeri tentu akan berdampak buruk terhadap para pekerja, kesejahteraannya dan ketersediaan lapangan kerja itu sendiri, yang sedari awal merupakan tujuan utama Donald Trump dalam pengambilan kebijakan ekonomi proteksionisme.

Puncak dari kebijakan Presiden Donald Trump yang menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian global ialah keputusannya terkait pengenaan tarif impor kepada

sebagian besar negara sebesar 25% terhadap baja dan 10% terhadap aluminium pada 8 Maret 2018. Namun, selang beberapa waktu Trump menyatakan penangguhan biaya tarif yang dibebankan kepada beberapa negara, namun tidak termasuk Tiongkok. AS menjelaskan bahwa tidak diberlakukannya penangguhan terhadap Tiongkok merupakan salah satu keputusan yang diambil dalam merespons besarnya defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok. Tiongkok tentu tidak tinggal diam dalam merespons kebijakan AS tersebut, AS dinilai telah berlaku diskriminatif terhadap produk asal Tiongkok. Hingga akhirnya Tiongkok mengumumkan daftar 128 produk asal AS yang akan dikenakan bea masuk mulai dari 15-25% jika negosiasi terkait pengenaan tarif gagal. Rentetan peristiwa tersebut lah yang kemudian memicu terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Salah satu peristiwa yang berdampak besar terhadap memanasnya situasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ialah kala adanya tudingan dari AS yang menyatakan bahwa Tiongkok telah melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, salah satunya ialah adanya tudingan mengenai pencurian kekayaan intelektual. Tuduhan ini ditujukan terhadap perusahaan asal Tiongkok, Huawei yang memasok komponen produk alat telekomunikasinya berasal dari Amerika Serikat. Dalam tuduhannya, AS juga menambahkan bahwa perusahaan Huawei telah terlibat dalam kegiatan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui Departemen Kehakimannya mengeluarkan dakwaan terhadap perusahaan Huawei yang dinilai menjalin konspirasi dengan Iran. Huawei dinilai telah melakukan penyalahgunaan produk alat telekomunikasinya dalam aktivitas penyadapan dan spionase terhadap negara-negara lain. Tudingan ini juga diperkuat dengan adanya hukum di Tiongkok yang mengharuskan perusahaan domestik bersedia memberikan data untuk kepentingan intelejen kepada Beijing.

Atas dasar tersebut lah kemudian pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Huawei berupa larangan penggunaan komponen chipset asal perusahaan AS, maupun chipset yang berasal dari produsen di negara lain yang menggunakan paten milik Amerika Serikat. Chipset itu sendiri merupakan salah satu komponen utama dari perangkat ponsel pintar, dan AS merupakan negara produsen chipset terbesar di dunia. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan produksi perangkat telekomunikasi buatan Huawei. Selain itu, pemerintah AS secara tegas juga melarang

penggunaan segala jenis alat telekomunikasi buatan Huawei di kantor-kantor pemerintahan Amerika Serikat dan dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan AS. Tak berhenti sampai di situ, pemerintah AS juga menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan AS, khususnya yang berkecukupan dalam penyedia layanan telekomunikasi untuk menghentikan dan memutus segala bentuk kerjasama terhadap perusahaan asal Tiongkok tersebut. Akibatnya Huawei tidak dapat lagi menggunakan akses berbagai layanan oleh Google dalam ponsel pintarnya. Hal ini juga membuat Huawei harus dapat memutar otak bagaimana agar selain produksinya masih dapat berjalan tanpa komponen asal AS, namun juga bagaimana Huawei mampu mempertahankan fitur-fitur utama dalam perangkat ponsel pintarnya.

Tudingan terhadap Huawei tersebut berbuntut panjang terhadap hubungan kedua negara. Terlebih hal ini terjadi ditengah-tengah panasnya konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Berita mengenai tudingan dan masuknya Huawei dalam daftar hitam oleh pemerintah Amerika Serikat juga ramai menghiasi pemberitaan internasional kala itu. Terlebih dengan adanya drama penangkapan putri dari bos Huawei, Meng Wanzhou yang menjabat sebagai kepala keuangan Huawei dan kala itu tengah berada di Kanada. Amerika Serikat mengirimkan permintaan langsung kepada otoritas Kanada untuk melakukan penangkapan terhadap Meng. Hal ini berdampak besar bagi kelangsungan kegiatan perekonomian tidak hanya bagi perusahaan Huawei, namun juga perusahaan-perusahaan domestik di Amerika Serikat penyuplai komponen bagi perangkat alat telekomunikasi milik Huawei.

Jika melihat kembali kebelakang pada tahun 2017, larangan ekonomi Amerika Serikat terhadap Huawei sebenarnya sudah terprediksi akan terjadi dari adanya sanksi yang dilayangkan AS terhadap perusahaan asal Tiongkok lainnya, ZTE yang dianggap melanggar perjanjian dagang dengan AS dengan cara menjual *smartphone* ke Iran. Pemerintah AS kala itu melayangkan sanksi 7 tahun larangan ekspor terhadap ZTE. Namun tak lama berselang sanksi tersebut kemudian ditangguhkan, hingga akhirnya dicabut sepenuhnya. Tentu atas beberapa kesepakatan diantara kedua belah pihak dan kesediaan ZTE untuk membayar denda dan uang jaminan terhadap pemerintah Amerika Serikat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Amerika Serikat melayangkan serangkaian tuduhan terhadap perusahaan raksasa teknologi komunikasi asal Tiongkok, Huawei. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dirasa kurang adil, karena pemerintah AS dianggap tidak mampu membuktikan tuduhan-tuduhannya secara jelas. Terlebih hal ini terjadi di tengah kisruh memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok mengenai perang dagang. Maka dari itu, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini ialah: **“Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang melatarbelakangi serangkaian kebijakan perdagangan Amerika Serikat di tahun 2018-2019 terhadap Huawei?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi Amerika Serikat terhadap Huawei yang dinilai telah melakukan praktik perdagangan curang dan dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat, serta menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang melatarbelakanginya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat maupun kegunaan yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. **Secara akademis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan wawasan dalam kajian studi Internasional dalam menganalisis studi kasus dengan menggunakan teori yang telah dipelajari sebelumnya.
2. **Secara praktis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan saran dan pemahaman mengenai *trade policy* dan berbagai hal serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Khususnya dalam studi kasus mengenai kebijakan ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan Huawei asal Tiongkok.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Alur pemikiran dan Asumsi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan jadwal penelitian.

### **BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang perang dagang AS-Tiongkok, Huawei sebagai ancaman bagi AS, dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei, beserta faktor-faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya.

### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bagian terakhir penelitian ini akan berisi kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran ini untuk merangkum dari bab-bab sebelumnya.